

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGGA ABADI**

**ACHMAD AFFANDI**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGAL ABADI**

disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD AFFANDI  
A31112263**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2016**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGGA ABADI**

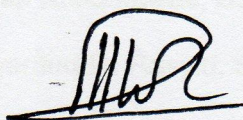
disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD AFFANDI  
A31112263**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

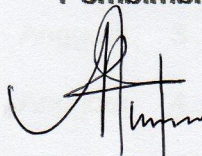
Makassar, Agustus 2016

Pembimbing I

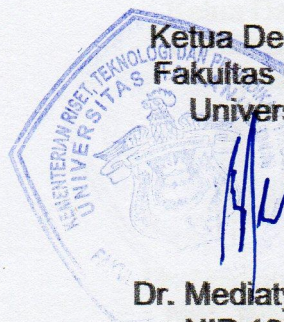


**Drs. Muh. Nur Azis, MM.  
NIP. 196012311988111004**

Pembimbing II



**Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.  
NIP.196511271991032001**



**Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin**

**Dr. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP.196509251990022001**



# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGAL ABADI

disusun dan diajukan oleh

**ACHMAD AFFANDI**  
**A31112263**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **13 Oktober 2016** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muh. Nur Azis, MM.	Ketua	1.
2.	Dr. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA.	Sekretaris	2.
3.	Dr. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA.	Anggota	3.
4.	Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si.	Anggota	4.
5.	Drs. Kastumuni Harto, Ak., M.Si., CPA., CA.	Anggota	5.

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Mediaty, S.E., M.Si., A.k., CA  
NIP. 19650925 199002 2 001



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ACHMAD AFFANDI

NIM : A31112263

departemen/program studi : AKUNTANSI

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGGA ABADI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



ACHMAD AFFANDI

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT Mitra Tritunggal Abadi” sebagai tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tentunya dilandasi dengan kesungguhan dan kesabaran dengan memaksimalkan segala kemampuan, pikiran, tenaga, dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai ketidaksempurnaan, namun inilah pencapaian peneliti yang maksimal.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berupa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan segala kemurahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu bapak Asikin Saleh dan mama Annie Rahayu yang senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan moral & materi kepada peneliti serta kakak-kakak kandung peneliti, Achmad Syachroni dan Achmad Ramdhani.
2. Bapak Prof. Dr. Gagaring Pagalung, S.E., Ak., MS., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Mediaty, S.E., Ak., M.Si., CA., dan bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA., Ak., CA., selaku Ketua dan Sekertaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Drs. H. Amiruddin, M.Si., Ak., CA. dan bapak Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si., selaku penasehat akademik peneliti selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Drs. Muhammad Nur Azis, M.M. dan ibu Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah membantu dan mengarahkan peneliti hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah berbagi ilmu yang luar biasa kepada peneliti.
7. Pak Aso', pak Ical akuntansi, pak Malik, bu Susi, bu Ida, pak Safar, bu Saidah, pak Masse, pak Bur, pak Budi, bu Sahari Bulan, pak Askar, pak Ical, pak Tarru', pak Asri, dan semua staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang tidak sempat peneliti sebut satu persatu.
8. PT Mitra Tritunggal Abadi, khususnya kepada bapak Drs. Hendy Leman selaku direktur utama dan ibu Marselina selaku staf akuntansi & keuangan yang memberikan izin penelitian dalam proses pengumpulan data.
9. Pengurus Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin 2014/2015, khususnya teman-teman panitia OC dan SC 8th *Hasanuddin Accounting Days* yang telah menuangkan segala pikiran dan mengorbankan waktu hingga terlaksananya kegiatan.



10. Senior- senior yang menyuguhkan wejangan pengetahuan mulai dari pra penyusunan skripsi ini dan senantiasa mewadahi peneliti untuk belajar kompre; Khairurrijal Ibrahim, Andi Muhammad Atthariq, Omar Shazaki Dilaga, Andi Rahmat Alfajri, dan Uswatun Hasana.
11. “Kangen No Name”, sahabat-sahabat tercinta yang selalu ada dan memberikan motivasi selama kuliah; Michael Chornelis, Fajrin Didipu, Hiraz Ghibran, Laurensius Nainggolan, Rakhmat Triantoro, Rifda Bamatraf, Tria Amelia, Kiky Dewanty, Fildzah Adelia, Metri DJ, Faiqah Rachman, Annisa Paramaswary, Ayu Lestari, Hawa Hardiyanti, dan Fitrah Aafreeda. *See you on top, guys!*
12. “Ayam”, sahabat yang selalu ada walaupun tidak nampak menemani hari-hari peneliti menyusun skripsi; Muhammad Rizal, Retno Savitri, Nur Firdausih, dan Michael Chornelis.
13. “Lahap”, sahabat kuliner di fakultas kapanpun lapar; Alam Sadikin, Amel Fajar, Sufenny Wijaya, dan Titin Rachman.
14. “Pe12ennial”, teman-teman tercinta akuntansi 2012 yang selalu menghiasi kelas-kelas selama perkuliahan, khususnya Ahok yang selalu membantu peneliti, Mamat, Fadli, Ali, Amir, Anti, li’, Arya Besse, Chaidir, Chia, Fatul, Cuse, Daly, Laras, Dhani, Diah, Eko, Fadel, Dila Zanaria, Ammi, Ai’, Febriyana, Filipus, Fitri, Uci, Gusti, Angga, Heri, Hilda, Ical, Ifah, Iffah, Ilmi, Imam, Indri, Aboy, Kiko, Kris, Maxy, Awal, Misna, Rahmat, Idham, Thaibi, Nue, Yaya, Parman, Priyo, Rahma, Gina, Ria, Iank, Rijal, Rina, Rizma, Rosa, Unna, Caca, Sandy, Eva, Pita, Sugi, Inggrid, Wildha, Yuli, Yuni, dan semua yang tidak sempat peneliti sebut.



15. "The Enjels", sahabat-sahabat dari SMA yang paling rusuh; Dwi Prian, Ahmad Syaukani, Fitria Nurul, Husnul Hasanah, Sarah Syahrir, Isthi Achmar, Asriani Anshar, Isma Basman, dan Nur Amirah.
16. "Berisik, sahabat-sahabat paskib; Hikma Prajawati, Ariantika Permatasari, Nurul Khadijah, Lucky Nosih, dan Alam Sadikin.
17. "Bosung Squad", keluarga bahagia mulai dari satu atap sejak KKN Reguler 90 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng; Edwin Fauzi, Fachry Fathrurahman, Sulvian Hasmi, Sarah Amirah, Putri Nirina, Rayhanah Firaby, Yunita Ayu, dan Apriliani Kusuma.
18. Teman-teman magang BI gelombang 4 tahun 2015 yang senantiasa bekerja di kantor, tetapi tidak lupa untuk mengerjakan tugas akhir skripsi; Retno Savitri, Karlina Ghazalah, Lita Maylina, Clara F. Raya, Dakry, Ahmad Faiz, Rifaldi Eka, dan Diah Sri Hartini.
19. "Arisan Pallu Kaloa", teman-teman yang masih menjaga silaturahmi dari SMP; Fathi Yusuf, Sadly Yusuf, Sadly Bakry, Melinda Yunita, Fitrah Amalia, Utami Bausat, Farli Aldian, dan Rifky Fauzy.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memohon maaf dan membuka diri untuk setiap kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi.

Makassar, Agustus 2016

Achmad Affandi

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PT MITRA TRITUNGGAH ABADI**

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION ANALYSIS OF DEFERRED TAX ACCOUNTING IN PT MITRA TRITUNGGAH ABADI**

Achmad Affandi  
Muhammad Nur Azis  
Nirwana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan keuangan PT Mitra Tritunggal Abadi setelah menerapkan akuntansi pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah *descriptive-quantitative*. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan koreksi fiskal pada PT Mitra Tritunggal Abadi terdapat kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp 716.326 untuk tahun 2013 dan Rp 563.620 untuk tahun 2014. Hasil analisis perbandingan akuntansi pajak penghasilan menurut perusahaan dengan akuntansi pajak penghasilan menurut PSAK No. 46 menunjukkan perusahaan belum menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No. 46 yang dalam pelaksanaannya perusahaan belum melakukan pemisahan kewajiban pajak kini dan kewajiban pajak tangguhan.

**Kata kunci:** penerapan akuntansi pajak tangguhan, koreksi fiskal, kewajiban pajak tangguhan

*The purpose of this study was to find out the presentation of financial statements is in PT Mitra Tritunggal Abadi after deferred tax accounting application in accordance with SFAS 46. This study used data collection and literature study. Descriptive-quantitative method was used for data analysis method. Based on the analysis performed shows that the implementation of fiscal correction in PT Mitra Tritunggal Abadi, there is deferred tax liability of Rp 716.326 on 2013 and is Rp 563.620 on 2014. The result of corporate income tax accounting comparative analysis is not in accordance with SFAS 46 shows that the company has not applied income tax accounting in accordance with SFAS 46 which in implementation, the company has not made separation between current tax liability and deferred tax liability.*

**Keyword:** *the application of deferred tax accounting, fiscal correction, deferred tax liability*



# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Teoretis .....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis .....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pajak.....	7
2.2 Pajak Penghasilan .....	9
2.2.1 Pengertian PPh .....	9
2.2.2 Subjek PPh .....	10
2.2.3 Objek PPh .....	12
2.2.4 Tarif PPh .....	15
2.3 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal .....	16
2.4 Koreksi Fiskal .....	19
2.5 Tinjauan Umum PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.....	20
2.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46 .....	21
2.5.2 Pengakuan dalam PSAK No. 46 .....	24
2.5.2.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini .....	25
2.5.2.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan .....	25
2.5.2.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi....	26
2.5.2.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan .....	26
2.5.3 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46 .....	26
2.5.4 Pengungkapan dalam PSAK No. 46 .....	28
2.5.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan .....	29
2.6 Rerangka Pemikiran .....	29
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian .....	31
3.2 Objek Penelitian .....	31
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	32

3.4.1 Jenis Data .....	32
3.4.2 Sumber Data .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	33
3.6 Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
4.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	35
4.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....	36
4.3 Kebijakan Akuntansi Perusahaan.....	38
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
5.1 Deskripsi dan Analisis Data.....	39
5.2 Pelaksanaan Akuntansi Pajak Penghasilan Ditinjau dari PSAK No. 46 .....	58
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
6.1 Kesimpulan .....	71
6.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dengan Omzet s.d. Rp 50 Miliar .....	16
5.1 Neraca PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013 .....	41
5.2 Neraca PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014 .....	42
5.3 Laporan Laba Rugi PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013 sebelum Koreksi Fiskal.....	44
5.4 Laporan Laba Rugi PT Tritunggal Abadi Tahun 2014 sebelum Koreksi Fiskal.....	45
5.5 Koreksi Fiskal PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013.....	47
5.6 Pengelompokan Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan.....	48
5.7 Pengelompokan Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan menurut PT Mitra Tritunggal Abadi .....	49
5.8 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 1 .....	49
5.9 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 2 .....	50
5.10 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 3 .....	51
5.11 Jenis-jenis Harta Berwujud yang Termasuk dalam Kelompok 4 .....	52
5.12 Koreksi Fiskal PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014.....	55
5.13 Laporan Laba Rugi PT Mitra Tritunggal Abadi setelah Koreksi Fiskal Tahun 2013 .....	61
5.14 Laporan Laba Rugi PT Mitra Tritunggal Abadi setelah Koreksi Fiskal Tahun 2014 .....	62
5.15 Neraca PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013 setelah Penerapan PSAK No. 46.....	65
5.16 Laporan Laba Rugi PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013 setelah Penerapan PSAK No. 46.....	66
5.17 Neraca PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014 setelah Penerapan PSAK No. 46.....	68
5.18 Laporan Laba Rugi PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014 setelah Penerapan PSAK No. 46.....	69

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Rerangka Pemikiran.....	30
4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	36



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	75
2 Daftar Aset Tetap PT Mitra Tritunggal Abadi .....	77

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terutang atau penghasilan pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer dan sisa kompensasi kerugian. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan akuntansi pajak tangguhan.

PSAK No. 46 mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dengan menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (*deferred tax*). Perbedaan temporer yang diperoleh dari perbedaan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang dijadikan dasar pelaporan SPT. Perbedaan temporer (*temporary differences*) menurut PSAK No.46 paragraf 7 didefinisikan sebagai berikut:

“Perbedaan temporer (*temporary differences*) adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan dasar pengenaan pajaknya.”

Apabila perbedaan tersebut sudah dapat ditentukan, maka dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhnya.

PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan keuangan perusahaan yang telah *listing* dan dianjurkan untuk digunakan bagi perusahaan yang belum *listing*. Standar ini berlaku efektif pada 1 Januari 1999 bagi perusahaan “*go public*”, sedangkan untuk perusahaan yang belum “*go public*” berlaku sejak 1 Januari 2001.

Pajak tangguhan dalam PSAK No. 46 berkaitan langsung dengan pajak penghasilan. Pengungkapan pajak penghasilan pada laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk berbagai alasan, seperti yang dikemukakan oleh Kieso dan Weygandt (2010:31), yaitu:

1. Penaksiran kualitas laba (*Assessment of quality of learning*). Banyak investor yang dalam usahanya menaksir kualitas laba perusahaan tertarik pada rekonsiliasi antara laba sebelum pajak dengan laba fiskal. Laba yang ditingkatkan melalui pengaruh pajak yang menguntungkan harus diperiksa secara hati-hati, terutama jika pengaruh pajak tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang.
2. Prediksi yang lebih baik atas arus kas masa depan (*Better prediction of future cash flow*). Pemeriksaan terhadap porsi yang ditangguhkan dari beban pajak penghasilan memberikan informasi apakah utang pajak akan lebih tinggi atau lebih rendah di masa depan. Pemeriksaan yang telah rinci dapat mengungkapkan kebijakan perusahaan berkaitan dengan kapasitas biaya atau pengakuan pendapatan dan kebijakan lain yang menimbulkan perbedaan antara laba akuntansi sebelum pajak dengan laba fiskal sebagai akibatnya, ini memungkinkan untuk memprediksi pengurangan masa depan dalam kewajiban pajak tangguhan yang mengindikasikan kepada kerugian dari likuiditas karena pembayaran pajak aktual akan lebih tinggi daripada beban pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi.
3. Membantu dalam penerapan kebijakan pemerintah (*Helpful in setting government policy*). Pemahaman jumlah pajak yang kini dibayar oleh

perusahaan dan tarif pajak efektif membantu pemerintah dalam membuat kebijakan.

Perusahaan mengakui jumlah taksiran pajak penghasilan (*provision for income taxes*) dilaporkan laba rugi sesuai dengan jumlah yang terutang menurut SPT berdasarkan *tax payable method*. Dengan berlakunya PSAK No. 46, jumlah beban pajak (*tax expense*) atau *provision for income taxes* yang harus diakui terdapat dua unsur utama, yaitu pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) merupakan jumlah PPh terutang atas penghasilan kena pajak periode berjalan, sedangkan unsur pajak tangguhan (*deffered tax*) dihitung dengan terlebih dahulu mengetahui perbedaan antara saldo menurut buku (*per books*) dan saldo menurut fiskal (per SPT PPh Badan) atau menghitung jumlah perbedaan temporer.

Perbedaan dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi komersial dan fiskal dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu perbedaan yang bersifat tetap/permanen dan perbedaan yang bersifat sementara/waktu. Perbedaan tetap adalah transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang diakui akuntansi, tetapi tidak diakui oleh peraturan perpajakan. Sedangkan perbedaan waktu adalah perbedaan pengakuan pendapatan atau biaya untuk perhitungan laba. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi, tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Perbedaan ini bersifat sementara karena akan tertutup di periode sesudahnya (Tjahjono dan Husein, 2009:562). Perbedaan tetap tidak memerlukan alokasi pajak antarperiode karena perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang mutlak sehingga tidak ada titik temunya atau saldo tandingannya. Berbeda dengan perbedaan permanen, perbedaan waktu



memerlukan alokasi pajak penghasilan interperiode karena terdapat efek pajak periode mendatang bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penerapan akuntansi pajak tangguhan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46 diharapkan dapat menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi.

Pengakuan konsekuensi pajak ini sering tidak diterapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. Permasalahan ini seringkali timbul akibat kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap perusahaan mengenai penerapan standar ini, terutama dalam perhitungan berapa besar pajak tangguhan yang harus diakui oleh perusahaan. Alasan lain yang mungkin menjadi faktor perusahaan-perusahaan tertutup belum menerapkan PSAK No.46 adalah tidak adanya sanksi yang diberikan apabila tidak menerapkan standar ini. Oleh karena itu, beberapa perusahaan lebih memilih untuk tidak menerapkan standar ini pada laporan keuangannya. Salah satu perusahaan yang belum menerapkan standar ini adalah PT Mitra Tritunggal Abadi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: "**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT Mitra Tritunggal Abadi**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penyajian laporan keuangan PT Mitra Tritunggal Abadi setelah menerapkan akuntansi pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah menyajikan laporan keuangan PT Mitra Tritunggal Abadi berdasarkan PSAK No. 46.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan sebagai bahan masukan ataupun usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan peneliti berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sebagai masukan, baik untuk bahan referensi maupun bahan perbandingan antara teori dan praktik yang ada.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep-konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

BAB III : Metode Penelitian, bab ini berisi rancangan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian, bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, perkembangan perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB V : Hasil dan pembahasan, bab ini menguraikan deskripsi penelitian, antara lain mengenai laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan (neraca) dan laba rugi sebelum & sesudah rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan kewajiban pajak tangguhan pada PT Mitra Tritunggal Abadi.

BAB VI : Kesimpulan dan saran, bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang diajukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pajak**

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur berikut.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Pihak yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Waluyo (2011:3), pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek, yaitu.



1. Aspek ekonomi.

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.

2. Aspek hukum.

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat. Peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

3. Aspek keuangan.

Pendekatan dari aspek keuangan ini tercakup dalam aspek ekonomi hanya lebih menitikberatkan pada aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

#### 4. Aspek sosiologi.

Pada aspek sosiologi, pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (*private saving*) atau berasal dari pemerintah (*public saving*).

## 2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

### 2.2.1 Pengertian PPh

Menurut Pasal 1 Undang-undang PPh No. 7 Tahun 1983, pajak penghasilan adalah:

“...pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 yang mengatur tentang akuntansi pajak penghasilan, pajak penghasilan adalah:

“...pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajaknya dikenakan atas penghasilan kena pajak.”

Menurut Purwono (2010:86), pajak penghasilan adalah:

“...salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan rakyat, merupakan wujud kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam pembiayaan dan pembangunan nasional.”

### 2.2.2 Subjek PPh

Subjek pajak penghasilan terdiri atas wajib pajak orang

pribadi dan badan. Menurut Diana dan Setiawati (2010:131), wajib pajak badan adalah:

“...sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang termasuk sebagai badan adalah perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Berdasarkan Undang-undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2, subjek pajak dibedakan menjadi:

1. subjek pajak dalam negeri, yaitu:
  - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
    1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
  4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri, yaitu:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;
  - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Secara ringkas, dapat kita simpulkan, subjek pajak adalah pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum



terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

### 2.2.3 Objek PPh

Objek PPh dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Menurut Waluyo (2009:183), dilihat dari mengalirnya (*inflow*) tambahan kemampuan ekonomis kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi.

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji honorarium, penghasilan dari praktik akuntan, dokter, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak seperti bunga, royalti, dividen, sewa, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan lain sebagainya.

Sedangkan dilihat dari penggunaannya (*outflow*), penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat juga ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

Penghasilan yang dikategorikan sebagai objek pajak diatur dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1), yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk.

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, atau badan lainnya;
  - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengambalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, ketentuan perundang-undangan perpajakan mewajibkan wajib pajak melakukannya sesuai dengan metode pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak itu sendiri, apakah berdasarkan basis akrual atau basis kas. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima. Kedua metode ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan beda waktu antara penghasilan dan beban yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan dengan peraturan perpajakan.

#### **2.2.4 Tarif PPh**

Djuanda dan Lubis (2004:63) mengatakan bahwa dalam pemungutan pajak, tarif merupakan tolok ukur untuk menetapkan beban pajak, selain pembagian penghasilan kena pajak (PKP) dalam lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*).

Pasal 17 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif atas penghasilan kena pajak wajib pajak sebagai berikut.

- a. Untuk perseroan terbuka yang sahamnya minimal dimiliki publik 40%. Bagi PT terbuka dengan saham yang dimiliki publik minimal 40% ada pengurangan tarif 5% (Pasal 17 (2b)) sehingga tarif menjadi:  
tarif pajak 2009 = 23%;  
tarif pajak 2010 = 20%.



- b. Bagi wajib pajak badan dengan omzet/penjualan kotor setahun sampai dengan Rp 50 miliar, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar, sehingga tarif PPh badan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Tarif Pajak Wajib Pajak Badan dengan Omzet s.d. Rp 50 Miliar**

Bagian Omzet	Tahun 2009	Mulai 2010
Bagian Omzet s.d. Rp 4,8 miliar	14%	12,50%
Rp 4,8 miliar < Bagian Omzet ≤ Rp 50 miliar	28%	25%

### **2.3 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal**

Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang tersedia. Adapun pengertian akuntansi fiskal merupakan bagian dari akuntansi yang berhubungan dengan penyajian informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Menurut Waluyo (2000:45), perbedaan antara akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal sebagai berikut.

1. Dasar penyusunan.

Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah Standar Akuntansi Keuangan yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Konsep.

Konsep laporan keuangan komersial terdiri dari:

- a. dasar akrual (*accrual basic*). Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan;
- b. mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (*proper matching cost and revenue*) melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dari transaksi atau peristiwa lain yang sama;
- c. konservatif (*conservative*), yaitu konsep hati-hati, kemungkinan rugi yang ditaksir sudah diakui sebagai kerugian dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada akhir tahun atau dengan membuat penyesuaian;
- d. materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial.

Konsep laporan keuangan fiskal terdiri dari:

- a. akrual stelsel (*stelsel accrual*). Pengaruh transaksi diakui penghasilan pada saat diperoleh penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum

diterima tunai, dan mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang;

b. mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (*proper matching taxable income and deductible expense*) sesuai dengan prinsip 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, beban (*expense*) yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (*taxable income*) adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan (*match and link*);

c. konservatif tidak digunakan;

d. materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan (selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan dengan metode langsung).

### 3. Tujuan.

Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan kekayaan, dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen. Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.

### 4. Akibat penyimpangan.

Akibat penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan

kreditur, investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan dari laporan keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi di bidang perpajakan antara lain, sanksi administrasi yang berupa denda, bunga kenaikan sedangkan sanksi pidananya berupa kurungan atau penjara.

## 2.4 Koreksi Fiskal

Dikemukakan oleh Muljono dan Wicaksono (2009:59), koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, masa manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial dengan secara fiskal. Perhitungan secara komersial adalah perhitungan yang diakui secara standar akuntansi yang lazim. Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh wajib pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan.

Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Trisnawati, 2009:218).

Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan berikut.

### 1. Beda tetap.

Suandy (2011:87) menyatakan bahwa:

“Perbedaan tetap/permanen (*permanent differences*) adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi di kemudian hari.”

Perbedaan tersebut disebabkan adanya pendapatan dan beban tertentu yang diakui pada Surat Pemberitahuan, tetapi tidak diakui pada laporan keuangan, demikian pula sebaliknya. Hal ini menyebabkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

## 2. Beda waktu.

Beda waktu (*timing differences*) merupakan perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer (Agoes dan Trisnawati, 2009:219). Beda waktu merupakan perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan ini mengakibatkan terjadinya pergeseran pengakuan antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya.

Dengan adanya koreksi fiskal, maka besarnya Penghasilan Kena Pajak yang dijadikan dasar perhitungan secara komersial dan secara fiskal akan dapat berbeda. Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang dapat berupa.

### 1. Koreksi positif.

Koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui di dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak.

### 2. Koreksi negatif.

Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak.

## 2.5 Tinjauan Umum PSAK No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan

Perlakuan akuntansi mengenai pajak penghasilan diatur oleh IAI melalui PSAK No. 46 tentang penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan serta

pengungkapan informasi yang relevan. Perubahan pendekatan yang dipakai oleh Standar Akuntansi Keuangan khususnya untuk akuntansi pajak penghasilan dari *income statement approach* atau *deffered method* menjadi *balance sheet approach* atau *asset-liability method* tidak dapat dipungkiri telah menambah kompleksitas penghitungan pajak penghasilan karena adanya pengakuan pajak tangguhan pada neraca.

### **2.5.1 Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46**

Tujuan PSAK No. 46 adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan dan bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan mendatang untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK No.46 Paragraf 2).

1. Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) di masa depan yang diakui dalam laporan posisi keuangan entitas.
2. Transaksi dan peristiwa lain pada periode berjalan yang diakui dalam laporan keuangan entitas.

Selain itu, PSAK No. 46 juga bertujuan untuk mengatur pengakuan aktiva pajak tangguhan yang berasal dari sisa rugi yang dapat dikompensasikan ke tahun berikut, penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut.

1. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final.

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

2. Mencakup pembatalan Paragraf 77, PSAK No. 16 yang menyatakan “apabila perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih perhitungan tersebut dengan utang pajak yang dihitung (yang dihitung menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan sebagian dari aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan tahun-tahun mendatang.”

PSAK No. 46 memiliki beberapa istilah penting yang perlu diketahui. Berikut pengertian pokok dari istilah-istilah tersebut (IAI 2015).

5. Aset pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya:
  - i. perbedaan temporer dapat dikurangkan;
  - ii. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
  - iii. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.

6. Beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
7. Dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas adalah jumlah teratribusi atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak dengan aset atau liabilitas untuk tujuan pajak.
8. Laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak.
9. Laba kena pajak atau laba fiskal (rugi pajak atau rugi fiskal) adalah laba (rugi) selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan atas pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan).
10. Liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
11. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode.
12. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa:
  - a. perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau
  - b. perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena



pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.

Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan akan mengakibatkan timbulnya aktiva pajak tangguhan karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh wajib pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer karena terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.

### **2.5.2 Pengakuan dalam PSAK No. 46**

Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva & kewajiban untuk tujuan perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi komersial. Istilah Dasar Pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran aktiva dan kewajiban Standar Akuntansi Keuangan.

Defenisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangan untuk tujuan fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak, maka DPP aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan pada masa depan.

### **2.5.2.1 Pengakuan Aktiva Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini**

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai kewajiban pajak kini. Jika jumlah ajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aktiva pajak kini.

### **2.5.2.2 Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan**

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang, kecuali yang timbul dari:

1. *goodwill negative* yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari penggabungan usaha;
2. pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, kecuali yang timbul dari:

1. *goodwill* yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal;

2. pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan laba fiskal.

#### **2.5.2.3 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikompensasi**

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang memadai untuk dikompensasi. Namun, perlu diketahui apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui.

#### **2.5.2.4 Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan**

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal dari (IAI 2009):

- a. transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda; atau
- b. penggabungan usaha secara substansi adalah akuisisi.

Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

#### **2.5.3 Penyajian Perkiraan-perkiraan Menurut PSAK No. 46**

1. Aktiva pajak dan kewajiban pajak.

Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban lainnya dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan harus

dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini. Apabila dalam laporan keuangan aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah dari aktiva dan kewajiban tidak lancar, maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.

#### 2. Saling menghapuskan (*offset*).

PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak tangguhan boleh atau harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva pajak kini harus dikompensasi (*offset*) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya harus disajikan pada neraca.

#### 3. Beban pajak.

Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.

#### 4. Pajak penghasilan final.

Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai pajak penghasilan final dibayar di muka dan pajak penghasilan final yang masih harus dibayar. Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.

#### 2.5.4 Pengungkapan dalam PSAK No. 46

Hal-hal berikut ini harus diungkapkan.

1. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak.
2. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
3. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui pada periode berjalan.
4. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku; atau (ii) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (*average effective tax rate*) dan tarif pajak yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.
5. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
6. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut, yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
7. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi yang dapat dikompensasi ke tahun berikut : (i) jumlah aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii) jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi

apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.

8. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i) keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau rugi dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan, bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada laporan keuangan.

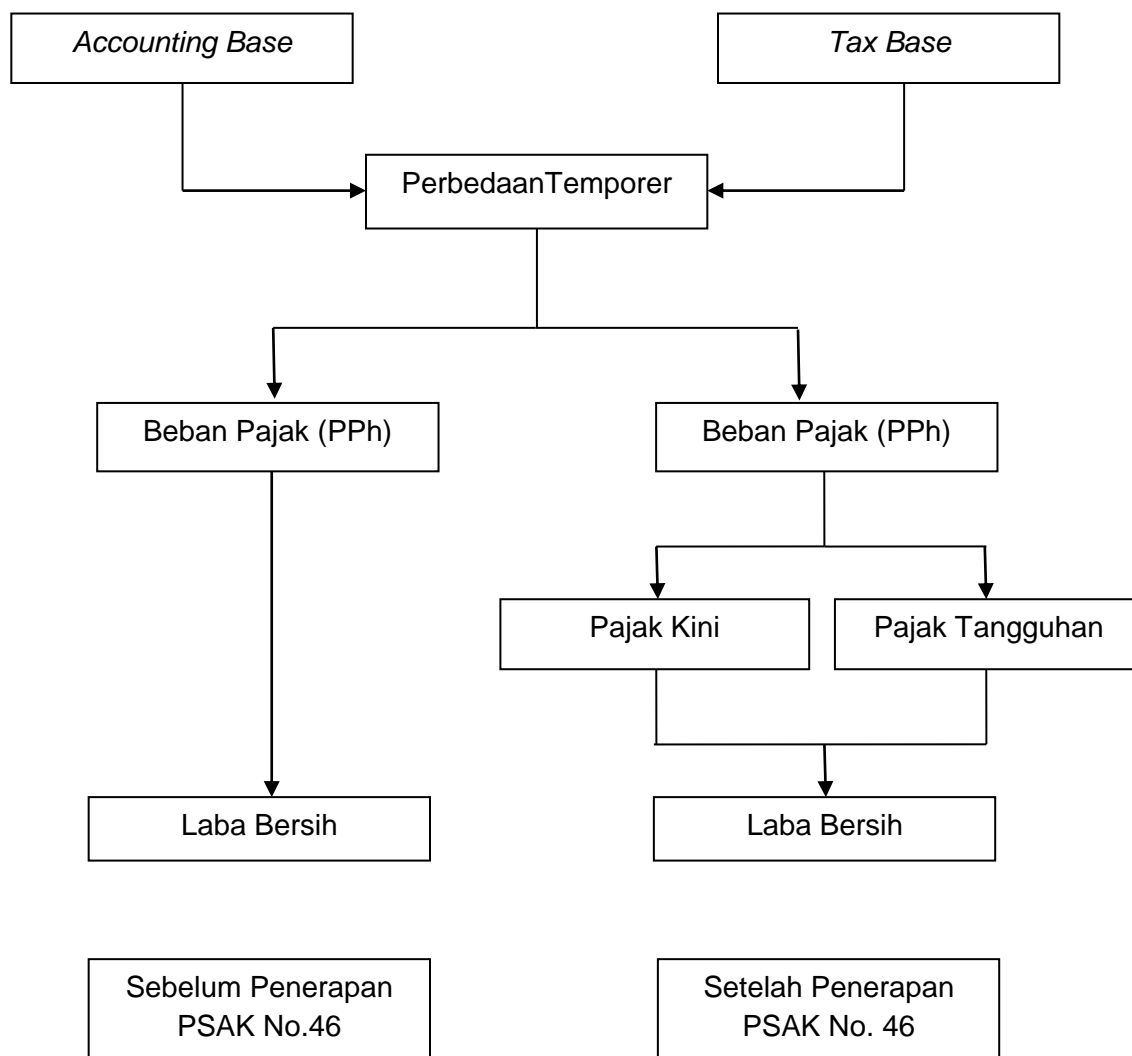
#### **2.5.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan**

Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalihkan beda waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan atau kewajiban dilunasi. Biasanya, tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi, yaitu 30 walaupun tarif sebenarnya bersifat progresif.

Apabila pada tahun yang bersangkutan terjadi rugi fiskal, maka pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara yang sama, yaitu tarif efektif rata-rata. Jika asumsinya 30%, maka 30% dikalikan dengan saldo rugi yang terjadi.

#### **2.6 Rerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran digunakan dalam pembahasan ini sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan skripsi ini yang digambarkan dalam bagan berikut.

**Gambar 2.1****Rerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang terbatas pada usaha untuk mengungkap suatu masalah, keadaan, dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilakukan melalui studi kasus dalam suatu perusahaan untuk mendapatkan gambaran umum tentang badan usaha, laporan keuangan perusahaan, dan penerapan akuntansi pajak penghasilan mengenai pajak tangguhan pada laporan keuangan yang dikaitkan dengan PSAK No. 46.

#### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian penulis adalah PT Mitra Tritunggal Abadi, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang berlokasi di Jl. Lamadukelleng No.17 Makassar.

#### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan metode pengumpulan data berikut.

1. Wawancara.

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan. Wawancara dilakukan dengan pegawai PT Mitra Tritunggal Abadi yang mengerti permasalahan pajak yang dibahas dalam penelitian (manajer keuangan dan akuntan). Wawancara



dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dilakukan melalui tatap muka maupun via telepon.

## 2. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari pengetahuan teoretis, yaitu data-data sekunder melalui buku maupun wacana yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Data kepustakaan yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini adalah ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang mengatur tentang Akuntansi Pajak Tangguhan di dalam PSAK No. 46. Data ini kemudian dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan data laporan keuangan perusahaan.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dapat diperoleh dengan melihat kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Data kuantitatif dapat diperoleh melalui dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak perusahaan PT Mitra Tritunggal Abadi (manajer keuangan dan akuntan) yang mengetahui tentang akuntansi pajak tangguhan dan bersedia memberikan informasi.

b. Data sekunder.

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. teknik observasi, dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, yaitu PT Mitra Tritunggal Abadi untuk memperoleh data-data yang relevan;
2. teknik *interview*, dilakukan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan manajer keuangan dan akuntan perusahaan untuk memperoleh data.

### 3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *descriptive-quantitative*. Metode ini menggambarkan perhitungan pajak penghasilan yang berkaitan dengan pajak kini dan pajak tangguhan.

Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

- a. laporan keuangan komersial dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan;
- b. melakukan analisis mengenai pencatatan dan pelaporan pajak penghasilan;
- c. membuat penyesuaian dan perhitungan pajak penghasilan tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46;
- d. membuat dan menyajikan laporan keuangan setelah menerapkan PSAK No. 46.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa PT Mitra Tritunggal Abadi hanya mengakui pajak yang timbul pada saat ini dan tidak mengakui konsekuensi pajak di masa yang akan datang sebagai akibat dari beda waktu yang terjadi. Unsur-unsur yang menyebabkan timbulnya pajak tangguhan pada laporan keuangan PT Mitra Tritunggal Abadi adalah perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan tarif yang digunakan menurut taksiran manajemen dengan ketentuan pajak dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap. PSAK No. 46 yang diterapkan pada laporan keuangan PT Mitra Tritunggal Abadi mengakibatkan laba bersih usaha atau laba setelah pajak menjadi lebih kecil. Laba bersih usaha pada tahun 2013 sebelum penerapan PSAK No. 46 sebesar Rp 1.139.937.081. Setelah penerapan PSAK No.46, timbul beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi perusahaan sebesar Rp 716.326 menyebabkan laba bersih usaha menjadi lebih kecil, yaitu Rp 1.139.220.755. Laba bersih usaha pada tahun 2014 juga menjadi lebih kecil, sebelum penerapan PSAK No. 46 sebesar Rp 1.039.507.663, timbul beban pajak tangguhan pada laporan laba rugi perusahaan sebesar Rp 563.620 menyebabkan laba bersih usaha menjadi Rp 1.038.944.043.

## 6.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan penulis, yaitu.

1. Manajemen PT Mitra Tritunggal Abadi khususnya bagian akuntansi dan pajak sebaiknya menyesuaikan metode penyusutan dan tarif yang digunakan atas perhitungan penyusutan aktiva tetap berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku agar koreksi fiskal atas perbedaan waktu tidak diperlukan lagi dan perencanaan pajak yang baik.
2. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak mengenai penerapan PSAK No. 46 perlu ditingkatkan agar para wajib pajak mampu membuat laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. 2010. *Cara Mudah Menghitung Pajak Penghasilan Anda, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Djuanda, Gustian, dan Irwansyah Lubis. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Kieso, Donald, Jerry Weygandt dan Terry Warfield. 2010. *Akuntansi Intermediate, Edisi Kedua Belas, Jilid Ketiga. Terjemahan oleh: Ali Akbar Yulianto, Wasilah, dan Ranga Handika*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2009. *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. 2009. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 2 Edisi 6*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, Achmad dan Fakhri Husein. 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. 2008. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Waluyo. 2000. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat  
\_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Pajak Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.  
\_\_\_\_\_. 2011. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

# LAMPIRAN 1



## BIODATA

### Identitas Diri

Nama : Achmad Affandi  
 Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 19 November 1994  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat Rumah : BTN Makkio Baji Blok B2 No. 12 Antang, RT 8 / RW 5,  
 Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Makassar  
 Telpon Rumah dan HP : 0411-492489 / 081242421422  
 Email : [achmadfandi19@gmail.com](mailto:achmadfandi19@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK Bhayangkari Makassar (1999-2000)
  - b. SD Negeri Paccinang 1 Makassar (2000-2006)
  - c. SMP Negeri 5 Makassar (2006-2009)
  - d. SMA Negeri 1 Makassar (2009-2012)
  - e. S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin
2. Pendidikan Non Formal/Training/Seminar
  - a. Latihan Kepemimpinan Tingkat Awal (LK1) Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (2012)

### Riwayat Organisasi

1. Dalam Universitas
  - a. Pengurus Departemen Hubungan Eksternal Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Periode 2014-2015
  - b. Ketua Panitia *8th Hasanuddin Accounting Days* IMA FE-UH (2015)

Makassar, Juli 2016

Achmad Affandi

# LAMPIRAN 2

**Daftar Aset Tetap PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013**

No.	Kelompok / Jenis Harta	Perolehan		Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des '12 (Rp)	Nilai Sisa Buku Awal Tahun 2013 (Rp)	Umur Ekonomis	Penyusutan			Nilai Buku Akhir Tahun 2013 (Rp)
		Waktu Perolehan	Nilai (Rp)				%	Tahun Ini (Rp)	s/d tahun 2013 (Rp)	
1	Bangunan	2005	1.000.000.000	400.000.000	600.000.000	20 tahun	5,0	50.000.000	450.000.000	550.000.000
2	Mobil Box Suzuki Carry - ST 150	Feb-10	115.000.000	41.927.083	73.072.917	8 tahun	12,5	14.375.000	56.302.083	58.697.917
3	Mobil Toyota Innova Luxury	Okt-12	381.475.000	11.921.094	369.553.906	8 tahun	12,5	47.684.375	59.605.469	321.869.531
4	Pesawat Telpon - Panaphone	Jan-01	100.000	100.000	-	8 tahun	12,5	-	100.000	-
5	AC 1 PK Split Changhong	Jan-01	2.500.000	2.500.000	-	8 tahun	12,5	-	2.500.000	-
6	AC 1 PK Split Changhong	Jan-02	3.400.000	3.400.000	-	8 tahun	12,5	-	3.400.000	-
7	Mesin Fax - Panasonic KX FT21	Jan-02	1.465.000	1.465.000	-	8 tahun	12,5	-	1.465.000	-
8	Pesawat Telpon - Citiphone	Jan-02	120.000	120.000	-	8 tahun	12,5	-	120.000	-
9	Pesawat Telpon	Jan-04	275.000	275.000	-	8 tahun	12,5	-	275.000	-
10	Meja Tulis dan Kursi	Jan-04	565.000	565.000	-	8 tahun	12,5	-	565.000	-
11	Printer LX 300 +	Jan-07	1.350.000	1.350.000	-	4 tahun	25,0	-	1.350.000	-
12	UPS Prolink	Jan-08	1.100.000	1.100.000	-	4 tahun	25,0	-	1.100.000	-
13	Monitor BenQ + PC	Jan-08	1.900.000	1.900.000	-	4 tahun	25,0	-	1.900.000	-
14	Printer Canon IP1880	Jan-08	505.000	505.000	-	4 tahun	25,0	-	505.000	-
15	Mesin Fax - Xerox 3210	Nop-10	4.500.000	1.781.250	2.718.750	8 tahun	12,5	562.500	2.343.750	2.156.250
16	Printer Epson Stylus L300	Mar-13	1.350.000	-	1.350.000	8 tahun	12,5	140.625	140.625	1.209.375
17	UPS ACP 1100 KWAH	Mar-13	1.670.000	-	1.670.000	8 tahun	12,5	173.958	173.958	1.496.042
18	Laptop Asus X502C	Mar-13	12.000.000	-	12.000.000	8 tahun	12,5	1.250.000	1.250.000	10.750.000
19	PC Lenovo	Mar-13	5.000.000	-	5.000.000	8 tahun	12,5	520.833	520.833	4.479.167
20	Mesin Fax-Brother 878	Jun-13	1.135.000	-	1.135.000	8 tahun	12,5	82.760	82.760	1.052.240
21	Modem Wigo Huawei	Jul-13	2.154.000	-	2.154.000	8 tahun	12,5	134.625	134.625	2.019.375
22	AC 1/2 PK Samsung	Okt-13	3.500.000	-	3.500.000	8 tahun	12,5	109.375	109.375	3.390.625
<b>TOTAL</b>			<b>1.541.064.000</b>	<b>468.909.427</b>	<b>1.072.154.573</b>			<b>115.034.051</b>	<b>583.943.479</b>	<b>957.120.521</b>

Sumbr: PT Mitra Tritunggal Abadi, 2013

**Daftar Aset Tetap PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2013**

No.	Kelompok / Jenis Harta	Perolehan		Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember '12 (Rp)	Nilai Sisa Buku Awal Tahun 2013 (Rp)	Umur Ekonomis	Penyusutan			Nilai Buku Akhir Tahun 2013 (Rp)
		Waktu Peroleha	Nilai (Rp)				%	Tahun Ini (Rp)	s/d tahun 2013 (Rp)	
1	Bangunan	2005	1.000.000.000	400.000.000	600.000.000	20 tahun	5,0	50.000.000	450.000.000	550.000.000
2	Mobil Box Suzuki Carry - ST 150	Feb-10	115.000.000	41.927.083	73.072.917	8 tahun	12,5	14.375.000	56.302.083	58.697.917
3	Mobil Toyota Innova Luxury	Okt-12	381.475.000	11.921.094	369.553.906	8 tahun	12,5	47.684.375	59.605.469	321.869.531
4	Pesawat Telpon - Panaphone	Jan-01	100.000	100.000	-	4 tahun	25,0	-	100.000	-
5	AC 1 PK Split Changhong	Jan-01	2.500.000	2.500.000	-	8 tahun	12,5	-	2.500.000	-
6	AC 1 PK Split Changhong	Jan-02	3.400.000	3.400.000	-	8 tahun	12,5	-	3.400.000	-
7	Mesin Fax - Panasonic KX FT21	Jan-02	1.465.000	1.465.000	-	4 tahun	25,0	-	1.465.000	-
8	Pesawat Telpon - Citiphone	Jan-02	120.000	120.000	-	4 tahun	25,0	-	120.000	-
9	Pesawat Telpon	Jan-04	275.000	275.000	-	4 tahun	25,0	-	275.000	-
10	Meja Tulis dan Kursi	Jan-04	565.000	565.000	-	8 tahun	12,5	-	565.000	-
11	Printer LX 300 +	Jan-07	1.350.000	1.350.000	-	4 tahun	25,0	-	1.350.000	-
12	UPS Prolink	Jan-08	1.100.000	1.100.000	-	4 tahun	25,0	-	1.100.000	-
13	Monitor BenQ + PC	Jan-08	1.900.000	1.900.000	-	4 tahun	25,0	-	1.900.000	-
14	Printer Canon IP1880	Jan-08	505.000	505.000	-	4 tahun	25,0	-	505.000	-
15	Mesin Fax - Xerox 3210	Nop-10	4.500.000	1.781.250	2.718.750	4 tahun	25,0	1.125.000	2.906.250	1.593.750
16	Printer Epson Stylus L300	Mar-13	1.350.000	-	1.350.000	4 tahun	25,0	281.250	281.250	1.068.750
17	UPS Merk ACP 1100 KWAH	Mar-13	1.670.000	-	1.670.000	4 tahun	25,0	347.917	347.917	1.322.083
18	Laptop Asus X502C	Mar-13	12.000.000	-	12.000.000	4 tahun	25,0	2.500.000	2.500.000	9.500.000
19	PC Lenovo	Mar-13	5.000.000	-	5.000.000	4 tahun	25,0	1.041.667	1.041.667	3.958.333
20	Mesin Fax - Brother 878	Jun-13	1.135.000	-	1.135.000	4 tahun	25,0	165.521	165.521	969.479
21	Modem Wigo Huawei	Jul-13	2.154.000	-	2.154.000	4 tahun	25,0	269.250	269.250	1.884.750
22	AC 1/2 PK Samsung	Okt-13	3.500.000	-	3.500.000	8 tahun	12,5	109.375	109.375	3.390.625
<b>TOTAL</b>			<b>1.541.064.000</b>	<b>468.909.427</b>	<b>1.072.154.573</b>			<b>117.899.354</b>	<b>586.808.781</b>	<b>954.255.219</b>

Sumber: Hasil olahan data, 2016

**Daftar Aset Tetap PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014**

No	Kelompok / Jenis Harta	Perolehan		Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember '13	Nilai Sisa Buku Awal Tahun 2014	Umur Ekonomis	Penyusutan			Nilai Buku (Rp)
		Waktu Peroleh	Nilai (Rp)				%	Tahun Ini (Rp)	s/d tahun 2014 (Rp)	
1	Bangunan	2005	1.000.000.000	450.000.000	550.000.000	20 tahun	5,0	50.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Mobil Box Suzuki Carry - ST 150	Feb-10	115.000.000	56.302.083	58.697.917	8 tahun	12,5	14.375.000	70.677.083	44.322.917
3	Mobil Toyota Innova Luxury	Okt-12	381.475.000	59.605.469	321.869.531	8 tahun	12,5	47.684.375	107.289.844	274.185.156
4	AC Split Changhong 1 PK	Jan-01	2.500.000	2.500.000	-	8 tahun	12,5	-	2.500.000	-
5	AC Split Changhong 1 PK	Jan-02	3.400.000	3.400.000	-	8 tahun	12,5	-	3.400.000	-
6	Meja Tulis dan Kursi	Jan-04	565.000	565.000	-	8 tahun	12,5	-	565.000	-
7	Printer LX 300 +	Jan-07	1.350.000	1.350.000	-	4 tahun	25,0	-	1.350.000	-
8	UPS Prolink	Jan-08	1.100.000	1.100.000	-	4 tahun	25,0	-	1.100.000	-
9	Mesin Fax - Xerox 3210	Nop-10	4.500.000	1.781.250	2.718.750	8 tahun	12,5	562.500	2.343.750	2.156.250
10	Printer Epson Stylus L300	Mar-13	1.350.000	140.625	1.209.375	8 tahun	12,5	168.750	309.375	1.040.625
11	UPS Merk ACP 1100 KwAH	Mar-13	1.670.000	173.958	1.496.042	8 tahun	12,5	208.750	382.708	1.287.292
12	Laptop Asus X502C	Mar-13	12.000.000	1.250.000	10.750.000	8 tahun	12,5	1.500.000	2.750.000	9.250.000
13	PC Lenovo	Mar-13	5.000.000	520.833	4.479.167	8 tahun	12,5	625.000	1.145.833	3.854.167
14	Mesin Fax - Brother Type 878	Jun-13	1.135.000	82.760	1.052.240	8 tahun	12,5	141.875	224.635	910.365
15	Modem Wigo Merk Huawei	Jul-13	2.154.000	134.625	2.019.375	8 tahun	12,5	269.250	403.875	1.750.125
16	AC Samsung 1/2 PK	Okt-13	3.500.000	109.375	3.390.625	8 tahun	12,5	437.500	546.875	2.953.125
<b>TOTAL</b>			<b>1.536.699.000</b>	<b>579.015.979</b>	<b>957.683.021</b>			<b>115.973.000</b>	<b>694.988.979</b>	<b>841.710.021</b>

Sumber: PT Mitra Tritunggal Abadi, 2014

**Daftar Aset Tetap PT Mitra Tritunggal Abadi Tahun 2014**

No	Kelompok / Jenis Harta	Perolehan		Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember '13 (Rp)	Nilai Sisa Buku Awal Tahun 2014 (Rp)	Umur Ekonomis	Penyusutan			Nilai Buku (Rp)
		Waktu Perolehan	Nilai (Rp)				%	Tahun Ini (Rp)	s/d tahun 2014 (Rp)	
1	Bangunan	2005	1.000.000.000	450.000.000	550.000.000	20 tahun	5,0	50.000.000	500.000.000	500.000.000
2	Mobil Box Suzuki Carry - ST 150	Feb-10	115.000.000	56.302.083	58.697.917	8 tahun	12,5	14.375.000	70.677.083	44.322.917
3	Mobil Toyota Innova Luxury	Okt-12	381.475.000	59.605.469	321.869.531	8 tahun	12,5	47.684.375	107.289.844	274.185.156
4	AC Split Changhong 1 PK	Jan-01	2.500.000	2.500.000	-	8 tahun	12,5	-	2.500.000	-
5	AC Split Changhong 1 PK	Jan-02	3.400.000	3.400.000	-	8 tahun	12,5	-	3.400.000	-
6	Meja Tulis dan Kursi	Jan-04	565.000	565.000	-	8 tahun	12,5	-	565.000	-
7	Printer LX 300 +	Jan-07	1.350.000	1.350.000	-	4 tahun	25,0	-	1.350.000	-
8	UPS Prolink	Jan-08	1.100.000	1.100.000	-	4 tahun	25,0	-	1.100.000	-
9	Mesin Fax - Xerox 3210	Nop-10	4.500.000	1.781.250	2.718.750	4 tahun	25,0	1.125.000	2.906.250	1.593.750
10	Printer Epson Stylus L300	Mar-13	1.350.000	140.625	1.209.375	4 tahun	25,0	281.250	421.875	928.125
11	UPS Merk ACP 1100 KwAH	Mar-13	1.670.000	173.958	1.496.042	4 tahun	25,0	347.917	521.875	1.148.125
12	Laptop Asus X502C	Mar-13	12.000.000	1.250.000	10.750.000	4 tahun	25,0	2.500.000	3.750.000	8.250.000
13	PC Lenovo	Mar-13	5.000.000	520.833	4.479.167	4 tahun	25,0	1.041.667	1.562.500	3.437.500
14	Mesin Fax - Brother 878	Jun-13	1.135.000	82.760	1.052.240	4 tahun	25,0	165.521	248.281	886.719
15	Modem Wigo Merk Huawei	Jul-13	2.154.000	134.625	2.019.375	4 tahun	25,0	269.250	403.875	1.750.125
16	AC Samsung 1/2 PK	Okt-13	3.500.000	109.375	3.390.625	8 tahun	12,5	437.500	546.875	2.953.125
<b>TOTAL</b>			<b>1.536.699.000</b>	<b>579.015.979</b>	<b>957.683.022</b>			<b>118.227.479</b>	<b>697.243.457</b>	<b>839.455.543</b>

Sumber: Hasil olahan data, 2016